

UPDATING DIREKTORI PERUSAHAAN KONSTRUKSI

KIP F

Diisi oleh BPS

1. Keterangan Umum Perusahaan :

Nama Perusahaan : Provinsi :
 Nama Pengusaha : Kabupaten/Kota :
 Alamat : Kecamatan :
 RT RW Desa/Kelurahan :
 Kode Pos dan Faximili : Fax : No Blok Sensus :
 Telepon/HP : HP : Nama & No SLS :
 E-mail : Website :

Petunjuk: Untuk Rincian 2, 3, 4, 6, 7 Lingkari salah satu kode, lalu pindahkan ke dalam kotak

2. Status Perusahaan Saat Dikunjungi :

Aktif -1 } lanjut ke R. 3 Tutup -3 } **STOP**
 Tidak Ditemukan -4 }
 Tutup Sementara -2 } Bukan Konstruksi -5 }

3. Kualifikasi Perusahaan: (lihat penjelasan)

K1 -2 K2 -3 K3 -4 M1 -5 M2 -6 B1 -7 B2 -8 Non Kualifikasi -9

4. Badan Hukum/Badan Usaha :

PT. Persero -1 PT -2 CV -3 Firma -4 Perwakilan Perusahaan/ -5 Lainnya -6
 Lembaga Asing

5. Jaringan perusahaan

Tunggal -1 Kantor pusat -2 Cabang -3 Perwakilan -4 Unit pembantu/penunjang -5

6. Tahun mulai beroperasi secara komersial :

7. Isikan Jenis borongan Pekerjaan Utama Yang Biasa Dikerjakan:

.....

8. Bidang Pekerjaan Utama: Konstruksi Gedung -1 Konstruksi Sipil -2 Konstruksi Khusus -3

9. Tempat Usaha : Kantor -1 Rumah Tinggal -2 Rukan -3 Lainnya (.....) -4

10. Banyaknya Pekerja Tetap, Kontrak, dan Outsourcing :

(jumlah pekerja pada saat pencacahan)

Laki-laki Perempuan Jumlah

Contact Person

Pencacah

Pengawas/Pemeriksa

Nama	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jabatan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No HP	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tanggal dan Tandatangani	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Catatan :

✧ Tujuan Survei :

Mendapatkan Direktori Perusahaan Konstruksi yang up to date untuk perencanaan pembangunan sektor konstruksi

✧ Dasar Hukum

Pelaksanaan survei ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Pasal 11)

✧ Kerahasiaan

Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 (Pasal 21)

✧ Biaya

Survei ini dibiayai oleh APBN. Dalam pelaksanaannya, tidak memungut biaya apapun dari responden

✧ Kewajiban Responden

Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 (Pasal 27)



PENJELASAN :

Status Perusahaan saat dikunjungi :

- Aktif : Keberadaan perusahaan masih aktif baik aktif lama, yaitu perusahaan ada pada frame direktori perusahaan konstruksi maupun yang aktif baru
- Tutup Sementara : Perusahaan yang menyatakan sementara tidak ada kegiatan/tutup sementara
- Tutup : Keberadaan perusahaan sudah tidak aktif lagi atau sudah pindah keluar kab/kota
- Tidak Ditemukan : Keberadaan perusahaan tidak ditemukan di lapangan
- Bukan Konstruksi : Perusahaan yang dikunjungi sudah tidak melakukan kegiatan pada sektor konstruksi

Kualifikasi perusahaan

adalah penggolongan perusahaan konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi kemampuan usaha, yang selanjutnya dibagi menurut kemampuan melaksanakan pekerjaan berdasarkan kriteria resiko, dan/atau kriteria penggunaan teknologi, dan/atau kriteria besaran biaya.

KUALIFIKASI USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Peraturan No.10 Th. 2014 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi			
No.	Golongan Usaha	Kualifikasi	Batas Nilai Satu Pekerjaan
1	Perorangan	Perorangan	s.d. 300 Juta
2	Kecil	K1	s.d. 1 Milyar
		K2	s.d. 1,75 Milyar
3	Menengah	K3	s.d. 2,5 Milyar
		M1	s.d. 10 Milyar
4	Besar	M2	s.d. 50 Milyar
		B1	s.d. 250 Milyar
5	Non Kualifikasi	B2	Tak Terbatas
		Tidak mendaftar ke LPJKN/sudah expired	

Klasifikasi Bidang Pekerjaan

Pengelompokan perusahaan konstruksi menurut jenis pekerjaan dan keahliannya berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2015

Terdapat 3 Klasifikasi Bidang Pekerjaan yaitu :

- Konstruksi Gedung (KBLI 41)

Mencakup kegiatan konstruksi bangunan baik untuk tempat tinggal atau bukan tempat tinggal, seperti gedung tempat tinggal, gedung yang digunakan untuk keperluan komersial dan industri, serta bangunan tempat ibadah.

- Konstruksi Sipil (KBLI 42)

Mencakup kegiatan konstruksi umum bangunan sipil, baik bangunan baru, perbaikan bangunan, penambahan bangunan dan perubahan bangunan, Golongan pokok ini mencakup bangunan jalan dan rel kereta api, jembatan, konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi, limbah, dan konstruksi bangunan sipil lainnya.

- Konstruksi Khusus (KBLI 43)

Mencakup kegiatan pembongkaran, penyiapan lahan, penyelesaian gedung, instalasi listrik, instalasi air (pipa), instalasi telekomunikasi, instalasi navigasi, dan instalasi konstruksi lainnya.

NAMA DAN ALAMAT BPS PROVINSI

No	BPS Provinsi	Alamat	Telp/Fax	Email
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	Jl. Tengku H. M. Daud Beureuh No. 50 Banda Aceh	(0651) 23005, 22862	bps1100@bps.go.id
2	Sumatera Utara	Jl. Asmara No. 179 Medan 20123	(061) 8452343, 842773	bps1200@bps.go.id
3	Sumatera Barat	Jl. Khatib Sulaiman No. 48 Padang 25136	(0751) 442158-59, 442161	bps1300@bps.go.id
4	Riau	Jl. Pattimura No. 12 Pekanbaru 28131	(0761) 23042, 21336	bps1400@bps.go.id
5	Jambi	Jl. A. Yani No. 4 Telanaipura Jambi 36122	(0741) 65438, 60802	bps1500@bps.go.id
6	Sumatera Selatan	Jl. Kapten Anwar Sastro No. 1694/1131 Kel. Sungai Pangeran Palembang 30129	(0711) 318456, 353174	bps1600@bps.go.id
7	Bengkulu	Jl. Adam Malik Km. 8 Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu 38225	(0736) 349117, 349115	bps1700@bps.go.id
8	Lampung	Jl. Basuki Rahmat No. 54 Teluk Betung Bandar Lampung 35215	(0721) 482909, 484329	bps1800@bps.go.id
9	Kep. Bangka Belitung	Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Pem Prov Kep. Bangka Belitung, Air Itam	(0717) 439421, 439425	bps1900@bps.go.id
10	Kepulauan Riau	Jl. Ir. Sutami No. 34 Tanjung Pinang 29100	(0771) 4571131, 23680, 312718	bps2100@bps.go.id
11	DKI Jakarta	Jl. Salemba Tengah No. 36 – 38 Kel. Paseban, Jakarta Pusat 10440	(021) 42877350, 42877350	bps3100@bps.go.id
12	Jawa Barat	Jl. Penghulu Hasan Mustapa No. 43 Bandung 40124	(022) 7272595, 7213572	bps3200@bps.go.id
13	Jawa Tengah	Jl. Menoreh Tengah X No. 4 Semarang 50236	(024) 86451840-2, 8311242, 8311195	bps3300@bps.go.id
14	D.I. Yogyakarta	Jl. Ringroad Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta	(0274) 387750, 4342234	bps3400@bps.go.id
15	Jawa Timur	Jl. Panjang Delta Permai Surabaya	(031) 8471143, 8438873	bps3500@bps.go.id
16	Banten	Jl. Raya Palima Pakupatan Serang Kav. H1-2 Banten 42171	(0254) 267027, 267026	bps3600@bps.go.id
17	Bali	Jl. Raya Puputan No. 1 Renon Denpasar	(0361) 238159, 238162	bps5100@bps.go.id
18	Nusa Tenggara Barat	Jl. Gunung Rinjani No. 2 Mataram 83125	(0370) 621385, 641242, 623801	bps5200@bps.go.id
19	Nusa Tenggara Timur	Jl. Raya R. Suprpto No. 5 Kupang 85111	(0380) 826289, 833124	bps5300@bps.go.id
20	Kalimantan Barat	Jl. Sutan Syahrir 24/42 Pontianak 78116	(0561) 735345, 732184	bps6100@bps.go.id
21	Kalimantan Tengah	Jl. Kapten Piere Tendean No. 6 Palangkaraya 73112	(0536) 3228105, 3238105, 322180	bps6200@bps.go.id
22	Kalimantan Selatan	Jl. Soekarno Hatta No.7 (Jl. Trikora), Banjarbaru, Kalsel	(0511) 3262314, 3261585	bps6300@bps.go.id
23	Kalimantan Timur	Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda (Gedung BAPPEDA)	(0541) 732793, 201121	bps6400@bps.go.id
24	Sulawesi Utara	Jl. 17 Agustus Manado 95119	(0431) 847044, 862204	bps7100@bps.go.id
25	Sulawesi Tengah	Jl. Prof Moh. Yamin No. 48 Palu 94114	(0451) 483610, 983612	bps7200@bps.go.id
26	Sulawesi Selatan	Jl. Haji Bau No. 6 Makassar 90125	(0411) 854838, 872879, 851225	bps7300@bps.go.id
27	Sulawesi Tenggara	Jl. Made Sabara No. 3 Kendari 93111	(0401) 3121751, 3122355	bps7400@bps.go.id
28	Gorontalo	Jl. Taman Pendidikan No. 117 Gorontalo	(0435) 834596, 834597	bps7500@bps.go.id
29	Sulawesi Barat	Jl. KH. Ahad No. 4 Mamuju 91511	(0426) 21265, 2703340, 21116	bps7600@bps.go.id
30	Maluku	Jl. Haruhun Karang Panjang Komplek Puleh Ambon 97121	(0911) 353306, 34228, 361320, 361319	bps8100@bps.go.id
31	Maluku Utara	Jl. Stadion No. 65 Kel. Stadion Kec. Ternate Ternate 97712	(0921) 3127878, 327878, 326301	bps8200@bps.go.id
32	Papua Barat	Jl. Drs. Esau Sesa Manokwari Papua Barat 98312	(0986) 214199, 2705156, 213038	bps9100@bps.go.id
33	Papua	Jl. Dr. Sam Ratulangi Dok II Jayapura 99112	(0967) 533028, 534519, 536490	bps9400@bps.go.id

DATA MENCERDASKAN BANGSA